

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yaman merupakan pusat Islam terpenting di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Mengenai perbatasannya, Yaman berbatasan dengan Arab Saudi di utara, Teluk Edem di selatan, Oman di timur, dan Laut Merah di barat. Luas dari negara Yaman sendiri adalah 527.970 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 28 juta jiwa dengan Islam sebagai agama resmi negara (Mohammed H, 2017). Awalnya, sebelum menjadi satu kesatuan, Yaman merupakan negara yang terbagi menjadi dua, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Dan pada tahun 1990, kedua negara bergabung dan penggabungan dilakukan dengan didasarkan oleh banyak kesamaan antara kedua negara. Kesamaan antara negara-negara ini termasuk kesamaan budaya, kebangsaan dan kondisi sosial. Dengan adanya berbagai kesamaan tersebut, akhirnya persatuan menjadikan Yaman sebagai negara Jazirah Arab disetujui serta Presiden terpilih Yaman adalah Ali Abdullah Saleh.

Pergolakan politik pecah di Timur Tengah karena dilandasi dengan adanya protes massal yang dikenal dengan peristiwa *Arab Spring*. Adapun adanya *Arab Spring* merupakan akibat dari maraknya pelanggaran HAM, angka pengangguran yang naik begitu signifikan, rezim diktator, kemiskinan, kenaikan harga bahan pokok, serta korupsi yang dilakukan oleh para pemangku jabatan negeri yang akhirnya merebaknya “virus” revolusi untuk perubahan yang perlu dilakukan di negara-negara bagian Timur Tengah (Juneau, 2013). Pemerintahan yang sudah dipimpin selama puluhan tahun oleh Presiden Ali Abdullah Saleh mulai runtuh pada tahun 2011, dimana kerusuhan politik sudah melanda negara Arab itu. Dan, berakhir dengan adanya tuntutan agar Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatannya.

Pada tahun 2012, di tengah terjadinya krisis pemerintahan di Yaman Wakil Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi terpilih sebagai Presiden Yaman. Terpilihnya Presiden Hadi ini disertai dengan adanya dukungan dari Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, hingga Arab Saudi. Kala itu, Presiden Hadi mencoba untuk mereformasi sistem politik yang ada di Yaman. Namun, di sisi lainnya, tahun 1997, Husein Al Houthi mendirikan Gerakan Al Syahab Al Mukmin. Diperkirakan sebanyak 650 anggota Al Syabab Al Mukmin ditangkap dan dipenjarakan oleh Pemerintahan pada tahun 2003, karena menyanyikan lagu-lagu yang menghina Amerika Serikat dan Israel. Diawali oleh kejadian ini, antara pemerintahan Yaman dan gerakan Al Syabab Al Mukmin hubungannya pun mulai memanas, sehingga Houthi pun beralih sebagai penentang pemerintah Yaman.

Al Houthi bergabung kedalam berbagai kelompok separatis di Yaman, hal ini dilakukan guna mendukung gerakannya untuk melawah pemerintah di Yaman. Setelah berhasil merebut ibu kota Yaman, Houthi juga menahan Presiden Hadi sebagai tahanan rumah pada tahun 2015. Dikarenakan, situasi yang semakin darurat dan banyaknya tekanan yang ada, bulan Januari 2015, Presiden Mansour Hadi mengumumkan bahwasannya akan mundur dari jabatan Presiden. Adanya pengunduran diri dari Presiden Hadi menyebabkan kekuasaan di Yaman kosong. Dan di sisi lain, sitausi di Sanaa pun semakin memburuk. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok Houthi tidak mendapat dukungan dari rakyat Yaman.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Yaman telah mencoba untuk menempuh jalur politik, namun seiring berjalannya waktu, tekanan yang diberikan oleh Pemerintah yaman semakin kuat dan juga mulai dilakukan dengan penggunaan kekuatan militer. Presiden Hadi pun mempertimbangkan untuk memulihkan kekuasaannya di Sanaa dengan cara meminta bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Akhirnya, Presiden Hadi mengirimkan surat permintaan bantuan untuk memulihkan keadaan di Yaman. Sebagai respon dari surat permintaan bantuan, pada bulan Maret 2015, Arab Saudi membentuk koalisi

dengan beberapa negara sebagai anggotanya. Aliansi tersebut meliputi Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Maroko, Yordania, dan Sudan. Aliansi negara ini pun mulai mengerahkan serangan militernya untuk memulihkan kekuasaan di Yaman (Jeremy, Yemen: Civil War and Regional Intervention, 2018).

Arab Saudi sendiri melancarkan operasi militer terbesar di Yaman dengan mengerahkan pesawat tempur serta tentara dalam pelaksanaan operasi militer ini. Intervensi ini bertujuan untuk menemukan titik damai dalam konflik yang terjadi di Yaman. Penyerangan oleh Arab Saudi dan negara koalisi ini juga dilakukan dengan cara adanya blockade pada wilayah darat, udara, dan laut. Penyerangan yang dilakukan juga dengan cara pengeboman pelabuhan Hodeidah. Pelabuhan Hodeidah adalah area penting yang berpengaruh pada proses alokasi bantuan internasional untuk rakyat Yaman.

Dalam aksinya di Yaman, Arab Saudi juga melakukan blockade melalui darat, laut dan udara. Adanya pemberlakuan blockade ini berakhir dengan memakan banyak korban jiwa dan memperparah krisis kemanusiaan di Yaman. Faktanya, perang yang berlarut-larut di Yaman berdampak serius pada populasi, dan krisis ekonomi yang parah dan membawa negara itu ke jurang kelaparan serta memperburuk keadaan di Yaman. Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi telah meningkatkan jumlah korban jiwa di Yaman. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa penduduk Yaman yang membutuhkan bantuan, yang awalnya diperkirakan 15,9 juta, meningkat 33% menjadi 21,1 juta orang hanya dalam waktu tiga bulan sejak dimulainya Operasi Badai (*Operation Decisive Storm*) oleh Arab Saudi dan negara-negara koalisinya (OCHA, 2015 Yemen: Humanitarian Needs Overview, 2015). Negara Yaman yang harus berhadapan dengan situasi konflik yang begitu rumit pun mengakibatkan Yaman menjadi sebagai salah satu dari negara dengan krisis kemanusiaan terparah di dunia (IRC, 2021).

Sadar akan dampak pada krisis kemanusiaan yang semakin fatal di Yaman. Maka, Arab Saudi pun mengambil peran untuk mulai meminimalisasi berbagai dampak buruk yang timbulkan pada krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh intervensi dari Arab Saudi pada konflik Yaman. Adapun cara yang ditempuh adalah Arab Saudi mempresentasikan inisiatif untuk mengajukan proposal perdamaian baru untuk mengakhiri perang di Yaman, salah satunya dengan cara melakukan gencatan senjata nasional di bawah pengawasan PBB serta menanggukkan serangan militer di Yaman. Selain itu, untuk menunjang tujuan dari Arab Saudi, telah dilakukan pula pemberian bantuan dana dari Arab Saudi guna memperbaiki keadaan di Yaman.

B. Rumusan Masalah:

Adapun Rumusan masalah dari skripsi ini adalah **“Bagaimana langkah yang ditempuh oleh Arab Saudi untuk meminimalisasi dampak dari *Humanitarian Crisis* pasca Intervensi Arab Saudi Pada Konflik Yaman?”**

C. Kerangka Berfikir:

1. Konsep Intervensi Kemanusiaan:

Perkembangan studi hubungan internasional telah banyak mengubah hubungan antar aktor negara, baik aktor dari negara maupun non negara. Dalam mencapai kepentingannya, para aktor akan berusaha untuk membuat suatu tujuan atau kepentingan yang sama dengan pihak lainnya. Tujuannya adalah agar mendapatkan kesepakatan untuk kepentingan bersama dan guna untuk menghindari berbagai konflik di suatu negara. Namun, terkadang, jika ada perbedaan antara satu pihak dan lainnya sehingga tidak menemukan persetujuan diantara kedua belah pihak, maka cenderung akan berakhir dengan terjadinya sebuah konflik. Dalam usaha untuk mencapai kepentingannya, suatu negara menempuh langkah dengan cara mengintervensi urusan internal suatu negara, misalnya keberadaan suatu negara terancam oleh masalah-

masalah yang timbul di negara tersebut. Intervensi yang dimaksud diimplementasikan dengan cara suatu negara keberadaannya terancam oleh permasalahan yang timbul di negara terkait, namun penyelesaian yang ditempuh tidak menimbulkan hasil yang signifikan dan tidak dapat diterima. Sehingga pada akhirnya intervensi dilakukan.

Terdapat beberapa pengertian mengenai intervensi contohnya dari Wirjono Prodjodikoro yang mana dikatakan: “Dalam hukum internasional, intervensi tidak berarti dalam arti luas campur tangan negara asing dalam urusan suatu negara, melainkan dalam arti sempit, yaitu intervensi merupakan campur tangan negara asing yang bersifat menindas atau memberikan ancaman kekerasan jika kehendaknya tidak dapat dipenuhi” (Prodjodikoro, 1967). Terdapat pula penjelasan dari, Oppenheim Lauterpacht yang mengatakan, intervensi merupakan campur tangan secara dictator dari suatu negara mengenai urusan internal dari suatu negara lainnya dengan tujuan nyata untuk mempertahankan atau mengubah kondisi atau situasi dari negeri tersebut (Adolf, 2002).

Pengertian dan praktek di atas, bersinggungan dengan penerapan terkait asas-asas umum hukum internasional, yaitu mengenai asas kedaulatan dan asas non-interverensi. Hukum internasional mengizinkan intervensi dilakukan dalam kondisi tertentu. Mengenai beberapa syarat intervensi dibenarkan oleh hukum internasional, yaitu:

1. Intervensi kolektif yang diatur dalam Piagam PBB
2. Pertahanan diri.
3. Guna melindungi hak dan kepentingan, serta keamanan warga negaranya dan negara lain.
4. Intervensi negara terkait keamanan
5. Jika suatu negara dianggap melanggar hukum internasional (Starke, 2006).

Salah satu bentuk intervensi adalah Intervensi Kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh organisasi (biasanya oleh negara atau koalisi negara) yang bertujuan untuk meringankan penderitaan manusia yang luas di dalam perbatasan negara berdaulat. Penderitaan yang

dimaksud cenderung merupakan hasil dari pemerintah yang menghasut, memfasilitasi, atau mengabaikan penyalahgunaan kelompok-kelompok yang termasuk dalam yusirdiksinya. Pelecehan ini sering mengambil bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang disengaja dengan sistematis, termasuk pengusiran paksa, pembersihan etnis, dan dalam kasus yang paling ekstrem yaitu genosida (Duncan, 2019). Sehingga, sejatinya intervensi kemanusiaan diarahkan pada perlindungan penduduk negara yang ditargetkan untuk intervensi, daripada warga negara dari negara yang melakukan campur tangan, dan tindakan ini dilakukan sebagai sebuah misi penyelamatan untuk warga suatu negara (Kritsiotis, 2012).

Ciri khas penting dari intervensi kemanusiaan adalah penggunaan sarana militer dalam lingkungan politik yang kontroversial untuk mencapai tujuan sosial ekonomi: untuk menjaga orang tetap hidup dengan menyediakan kebutuhan dasar, seperti ketahanan fisik, makanan, dan air. Dalam kebanyakan kasus, intervensi kemanusiaan mengarah pada upaya politik yang eksplisit dari rekonstruksi pasca-konflik, pembangunan bangsa, dan demokratisasi. Tujuan jangka panjang ini berusaha untuk mengatasi penyebab krisis kemanusiaan dan mencegah kekerasan dan penderitaan tambahan. Intervensi kemanusiaan tidak termasuk ekstraksi militer terhadap warga negara asing atau operasi bantuan darurat oleh organisasi bantuan tanpa keterlibatan unit militer asing (Seybolt, 2017).

Faktor dari Arab Saudi melakukan intervensi pada konflik Yaman adalah merupakan respon dari surat yang dilayangkan oleh Presiden Hadi untuk meminta bantuan kepada negara Arab Saudi dan negara-negara teluk untuk memulihkan keadaan dan kekuasaannya di Yaman. Sehingga, Arab Saudi dan negara-negara teluk pun membantu dan melakukan intervensi kemanusiaan. Intervensi ini dilakukan guna mempertahankan kekuasaan di Yaman. Agar warga negara Yaman dapat dijaga keamanannya, setelah memanasnya konflik yang terjadi antara pemerintahan resmi dengan kelompok oposisi di Yaman.

2. Konsep *Humanitarian Crisis*:

Humanitarian Crisis merupakan situasi di mana penderitaan manusia dan kesejahteraan manusia sangat rendah dan berada dalam bahaya dalam skala yang tinggi. Istilah *Humanitarian Crisis* digunakan ketika merujuk pada dampak bencana alam dan dampak buatan manusia dimana dampak dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab *Humanitarian Crisis*, dua kategori umum yang digunakan dalam sektor kemanusiaan dalam menggambarkan *Humanitarian Crisis* tersebut adalah (a) bencana alam (b) keadaan darurat yang kompleks seperti kecelakaan akibat dari adanya konflik (Quintanilla J, Hardman J, Abud M, Campbell A, Ensor D, 2014).

International Accounting Standards Committee (IASC) mengartikan situasi darurat yang kompleks merupakan sebuah keadaan *Humanitarian Crisis* di suatu negara, wilayah atau negara adalah di mana terdapat kapasitas besar yang dihasilkan dari konflik internal atau eksternal. Permasalahannya mengenai konflik dalam skala kekerasan yang besar seperti perang saudara dan genosida. Kompleksitas tersebut ditandai dengan beberapa contoh, yaitu: a. Kekerasan b. Migrasi penduduk c. Dampak konflik terhadap perekonomian d. Kebutuhan dan hambatan bantuan kemanusiaan e. Ancaman keamanan terhadap pekerja bantuan kemanusiaan (Quintanilla J, Hardman J, Abud M, Campbell A, Ensor D, 2014).

Dalam hal ini, perang saudara yang terjadi di Yaman semakin memperburuk keadaan, perang yang terjadi berdampak dengan melemahnya sektor ekonomi negara yang membuat meningkatnya inflasi, mengurangi kegiatan impor, dan menimbulkan kerusakan infrastruktur. Keterlibatan Arab Saudi pada serangan yang terjadi di Yaman telah menyebabkan munculnya keadaan darurat yang begitu kompleks dimana artinya krisis kemanusiaan di Yaman pun semakin parah dan kasus korbannya semakin meningkat.

D. Temuan

Intervensi yang dilakukan Arab Saudi pada konflik Yaman berimplikasi dengan meningkatnya intensitas konflik serta memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman. Kekerasan yang semakin meluas, kebutuhan tinggi akan bantuan pangan, hingga risiko keamanan bagi warga negara Yaman pun menjadi dampaknya. Arab Saudi pun menempuh langkah untuk meminimalisasi dampak krisis kemanusiaan yang semakin fatal di Yaman pasca intervensinya, yaitu: mempresentasikan inisiatif untuk mengajukan proposal perdamaian baru guna mengakhiri perang di Yaman yang berisi mengenai senjata dibawah naungan PBB serta bekerja sama dengan komunitas internasional serta pemerintahan agar inisiatif tersebut dapat diterapkan. Selain itu, Arab Saudi juga memberikan donasi untuk memulihkan keadaan *Humanitarian Crisis* di Yaman.

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang dipaparkan, maka terbentuk tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Guna menjelaskan dinamika perang di Yaman dan implikasinya pada konflik di Yaman pada aspek *Humanitarian Crisis* setelah adanya intervensi Arab Saudi.
2. Guna menjelaskan langkah yang digunakan oleh Arab Saudi sebagai usaha untuk meminimalisasi dampak dari *Humanitarian Crisis* pada konflik Yaman.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Artinya, data yang dihasilkan merupakan tindak lanjut dari adanya analisis dari hasil penelitian lain yang berbentuk buku, berita, jurnal maupun dokumen-dokumen terkait dengan isu yang dibahas peneliti (Robert

C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1992) dan tidak dilakukan observasi langsung. Lalu, untuk teknik analisa datanya dilakukan dengan analisa deskriptif kualitatif. Sehingga tidak digunakan angka statistik tetapi dilakukan dengan menginterpretasikan fenomena yang terjadi.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian adalah waktu ketika dimulainya Arab Saudi membantu permintaan Presiden Hadi untuk membantu keamanan di Yaman pada tahun 2015- sampai dengan pengajuan proposal damai oleh Arab Saudi pada konflik Yaman pada tahun 2021.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan ditulis dalam empat bab, dimana pembahasan pada setiap bab akan dijabarkan secara detail pada sub-sub bab. Setiap bab pun akan berisi pembahasan yang memiliki korelasi antara satu bab dan lainnya. Sehingga pembahasan akan bab akan membentuk sebuah pembahasan yang komperensif.

BAB I: Pendahuluan

BAB II: Gambaran konflik dan implikasi dari Konflik Yaman

BAB III: Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Langkah Arab Saudi dalam meminimalisasi dampak *humanitarian crisis* di Konflik Yaman

BAB IV: Kesimpulan